



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ALFIYAH ERNAWATI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 427388

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 7.559.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000
2. Tanah Seluas 199 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 187.000.000
3. Tanah Seluas 164 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
4. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
5. Tanah Seluas 1870 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 127.000.000
6. Tanah Seluas 1396 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
7. Tanah Seluas 10480 m2 di KAB / KOTA GRESIK, WARISAN Rp. 5.955.000.000
8. Tanah Seluas 1521 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 4.500.000

1. MOTOR, HONDA KARISMA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 8.762.070.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	145.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	16.470.570.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	16.470.570.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.